

BAB III

**DINAMIKA PERKEMBANGAN *EUROSCEPTIC* DI UNI EROPA DAN
REFERENDUM INGGRIS TAHUN 2016**

Dalam BAB III penulis akan mengulas terkait bagaimana dinamika perkembangan kelompok eurosceptic di Uni Eropa dan *overview* terkait Referendum Inggris pada tahun 2016. Bab ini terdiri dari tiga bagian, bagian pertama penulis akan membahas terkait bagaimana definisi dan berbagai klasifikasi *eurosceptic* oleh para analis. Bagian kedua penulis akan mengemukakan terkait dinamika perkembangan kelompok eurosceptic di Uni Eropa. Selanjutnya pada bagian ketiga akan diuraikan bagaimana latarbelakang referendum Inggris, pergulatan logika antara brexit dan bremain dan hasil penghitungan suara referendum.

A. Definisi Dan Klasifikasi *Eurosceptic*

1. Definisi *Eurosceptic*

Istilah *eurosceptic* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk orang-orang Eropa yang meragukan keberadaan Uni Eropa, *eurosceptic* berasal dari dua kata yang digabungkan menjadi satu yaitu Euro dan Skeptic, Euro memiliki arti Eropa, dan Skeptic memiliki arti orang yang suka meragui sesuatu, maka secara sederhana *eurosceptic* dapat diartikan dengan orang-orang Eropa yang meragukan atau menolak adanya integrasi di Eropa. Sedangkan jika merujuk pada kamus Cambridge, *eurosceptic* memiliki arti : kata benda, yaitu berupa seseorang, terutama politikus, yang menentang hubungan dekat antara Inggris dan Uni Eropa.

Istilah *eurosceptic* pertama kali muncul pada 11 November tahun 1985 dalam koran Inggris, *The Times*, untuk menggambarkan oposisi skeptis terhadap Uni Eropa dan kebijakan-kebijakan dari Uni Eropa, istilah ini menjadi lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan istilah *euro-phobia* ataupun istilah *anti-Europeanism* (Mehlika Ozlem Ultan, 2015). *Eurosceptic* hampir terdapat di setiap kalangan terutama dikalangan para aktor politikus, dan paham ini pun hampir terdapat diseluruh negara anggota Uni Eropa, hanya saja dengan level dan jumlah yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya (Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union, 2013).

Eurosceptic, perasaan ragu atau kurangnya kepuasan terhadap Uni Eropa telah didefinisikan dengan berbagai macam makna seperti *euro-pessimists*, *euro-phobia*, *euro-criticism* dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, *euroscepticism* juga dinilai menjadi sebagai sebuah pandangan yang serupa dengan *europhobia* (ketakutan terhadap Uni Eropa) semisal *xenophobia* (ketakutan terhadap orang asing) (Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union, 2013). Hal ini diakibatkan karena *euroscepticism* bukan merupakan suatu konsep yang sangat spesifik. Diantaranya bahkan berpendapat bahwa *euroscepticism* telah menjadi semacam kata penarik perhatian yang digunakan oleh media, elit politik dan dunia akademis dengan akibat menghasilkan banyak perbedaan arti dan konotasi.

Walaupun terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan konsep eurosceptic secara spesifik, namun secara umum eurosceptic berisi gagasan terkait penolakan terhadap Uni Eropa. Pandangan euroscepticism dapat diungkapkan sebagai prinsip skeptisisme terhadap keseluruhan proyek Uni Eropa. Dengan demikian definisi ini menafikan segala interpretasi skeptis atau keraguan yang hanya pada bagian tertentu dari kebijakan Uni Eropa, seperti kebijakan pertanian bersama atau kebijakan Uni Eropa lainnya (Hansen, 2008).

Sebagaimana yang dilansir dalam euractive.com : *“Eurosceptics are citizens or politicians who present themselves as ‘sceptical’ - critical - of the union which they say takes powers away from their national government and poses a threat to their national sovereignty.”* (euractiv, 2013). Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa *eurosceptic* ialah para masyarakat dan para politisi yang menunjukkan keraguan mereka terhadap keberadaan Uni Eropa, yang mana menurut pandangan mereka bahwa Uni Eropa ini telah merebut kekuatan negara mereka dan dilain sisi mereka menganggap bahwa keberadaan Uni Eropa akan membahayakan kedaulatan negara mereka.

2. Klasifikasi *Eurosceptic*

We attempted to break this concept down to distinguish between principled (Hard) opposition to European integration and contingent (Soft) opposition, with attitudes towards a country's membership of the EU being viewed as the ultimate litmus test of whether one fell into the first or second camp. Consequently, we

arrived at the following definition of party-based Hard Euroscepticism as being: "where there is a principled opposition to the EU and European integration and therefore can be seen in parties who think that their countries should withdraw from membership, or whose policies towards the EU are tantamount to being opposed to the whole project of European integration as it is currently conceived." Party-based Soft Euroscepticism, on the other hand, was "where there is NOT a principled objection to European integration or EU membership but where concerns on one (or a number) of policy areas leads to the expression of qualified opposition to the EU, or where there is a sense that 'national interest' is currently at odds with the EU trajectory" (Taggart, *Theorising Party Problems of Definition, Measurement and Causality*, 2003).

Bersumber dari sebuah jurnal dengan tulisan yang berjudul *Theorising Party-Based Euroscepticism: Problems of Definition, Measurement and Causality*, diterbitkan oleh Sussex European Institute pada tahun 2013. Dipaparkan bahwa *euroscepticism* di kategorikan menjadi dua kelompok, yaitu *Hard Euroscepticism* dan *Soft Euroscepticism*. *Hard Euroscepticism*, yaitu para aktor yang memiliki prinsip untuk menolak keberadaan Uni Eropa dan integrasi Eropa, dan berpendapat bahwa Inggris sudah seharusnya keluar dari keanggotaan di Uni Eropa, *The United Kingdom Independence Party* (UKIP) merupakan salah satu contoh dari *Hard Euroscepticism*. Sedangkan *Soft Euroscepticism*, yaitu para aktor yang tidak memiliki suatu prinsip yang menolak terhadap keanggotaan Uni Eropa dan integrasi Eropa, melainkan mengfokuskan penolakan pada satu area kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, atau memiliki pandangan bahwa kepentingan nasional

negaranya tidak terpenuhi melalui kebijakan yang ada di Uni Eropa. *The British Conservative Party* dan *the European United Left-Nordic Green Left alliance* merupakan contoh dari kelompok *Soft Euroscepticism*.

Diawal kemunculannya, *euroscepticism* telah dianggap sebagai sindrom Inggris. Saat ini sebuah sindrom yang pada awalnya hanya menyebar di Inggris telah merambah ke seluruh benua Eropa. Beberapa dari sekian banyak kritik utama terhadap kebijakan Uni Eropa ialah munculnya defisit demokrasi dalam Uni Eropa, kurangnya transparansi, kurangnya fleksibilitas, tren menciptakan superstate yang sangat terpusat. Kendala utama dalam hubungan dengan Uni Eropa tampaknya ketidakmampuan untuk mengidentifikasi metode yang sesuai untuk mengelola hubungan nasional dengan supranasional.

Kebanyakan analis percaya bahwa ada beberapa definisi dan tingkatan *Euroscepticism*, berdasarkan sikap kritis terhadap beberapa aspek dari tindakan Uni Eropa. Selain klasifikasi *eurosceptic* diatas yang membagi paham ini menjadi dua bagian, *hard* dan *soft eurosceptic*. Monica Condruz Băcescu, dalam tulisannya yang berjudul *Euroscepticism Across Europe: Drivers and Challenges*, membagi *eurosceptic* menjadi empat bagian. Pertama, *Euroscepticism* berdasarkan kriteria ekonomi: Mengukur secara pragmatis terkait manfaat utama dan biaya yang timbul dari keanggotaan Uni Eropa.

Kedua, *Euroscepticism* berdasarkan kriteria kedaulatan: Menganggap bahwa, pada tingkat Uni Eropa, kerjasama seharusnya tidak menjadi tantangan bagi kedaulatan nasional. *Eurosceptic* mendukung kerjasama supranasional dalam hal

dimana negara tidak bisa mengelola sendiri (seperti masalah lingkungan dan perjuangan melawan kejahatan terorganisir), namun tetap dapat melestarikan keterampilan nasional untuk kebijakan sosial-cultural. Ketiga, *Euroscepticism* berdasarkan kriteria yang demokratis: Memandang struktur kelembagaan dalam Uni Eropa saat ini tidak memadai ataupun tidak mampu dalam mengakomodir representasi dan partisipasi demokratis warga negara. Keempat, *Euroscepticism* berdasarkan kriteria politik: Menilai tindakan Uni Eropa berjalan berdasarkan doktrin milik suatu kelompok politik tertentu; namun para analis percaya bahwa bentuk *eurosceptic* ini belum terbukti dalam sosial (Băcescu, *Euroscepticism Across Europe: Drivers and Challenges*, 2014).

Sementara klasifikasi *eurosceptic* yang telah dikemukakan oleh Sussex institution dan Monica Condruz Băcescu, dalam tulisannya yang berjudul *Euroscepticism Across Europe*. *Eurosceptic* juga diklasifikasikan berdasarkan konseptual integrasi Eropa oleh Sofia Vasilopoulou dalam tulisannya yang berjudul *Varieties of Euroscepticism: The Case of the European Extreme Right*. Dalam tulisannya Sofia mengemukakan bahwa secara konseptual integrasi Eropa terbagi kedalam tiga dimensi, pertama *Principle*, kedua *Practice*, ketiga *Future*. Dimensi prinsip, menunjukkan keinginan dan kemauan untuk menjalin kerjasama dilevel multilateral, dalam hal ini Uni Eropa. Dimensi praktek, berindikasikan kebijakan status quo dalam menjalankan fungsi dari Uni Eropa. Dimensi masa depan, terkait antusias dalam perluasan cangkupan kerjasama dan kebijakan didalamnya.

Konseptualisasi dari integrasi ini memberikan gambaran terhadap kriteria dasar dari pembagian klasifikasi *eurosceptic* di Eropa. Tipologi ini mengidentifikasikan eurosceptic menjadi tiga macam. Pertama, tipe '*Rejecting*', yaitu jenis yang menentang segala macam kerjasama multilateral di Eropa, dan mendukung prinsip penentuan nasib nasional sendiri (*self determination*). Kedua, tipe '*Conditional*', yaitu jenis yang tidak menentang prinsip integrasi multilateral di Eropa, namun menentang segala kebijakan yang diajukan oleh institusi dan menentang perluasan integrasi. Ketiga, tipe '*Compromising*', yaitu jenis yang menerima konseptual prinsip dan praktek, namun menentang kebijakan untuk memperluas cangkupan integrasi **Invalid source specified.**

B. Dinamika Perkembangan *Eurosceptic*

Ada berbagai macam pandangan yang digunakan oleh masyarakat Eropa dalam melihat posisi Uni Eropa terhadap negara mereka. Meskipun Uni Eropa tidak jarang mendapatkan kendala dalam perjalanannya, seperti masalah keuangan Eropa dan penurunan dukungan publik terhadap penerapan mata uang tunggal Uni Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Namun survey menunjukkan bahwa Uni Eropa dalam pandangan mayoritas masyarakat Eropa sebagai institusi yang menguntungkan bagi publik dan negara mereka. warga negara Uni Eropa sangat menghargai kebebasan dalam melakukan perjalanan, pekerjaan, dan hidup di negara-negara Uni Eropa lainnya.

Namun walaupun demikian, pada saat yang sama selalu terdapat sejumlah masyarakat *euroceptic* atau masyarakat yang menunjukkan antipati terhadap keberadaan institusi Uni Eropa. Pada dasarnya, ide *euroceptic* dipicu oleh kekhawatiran mereka pada hilangnya kedaulatan negara atau fokus mereka terhadap terkikisnya demokrasi di Uni Eropa, dengan asumsi bahwa masyarakat biasa tidak memiliki hak dalam pembuatan keputusan di Brussels. Terlebih bahwa baru-baru ini Uni Eropa menunjukkan stagnansi ekonomi dan krisis di zona euro, beriringan dengan kekhawatiran pada isu imigrasi dan globalisasi. Hal ini berdampak pada meningkatnya dukungan bagi partai populis dan *euroceptic* di seluruh Eropa (Archick, 2016).

Beberapa akan berpendapat bahwa *euroceptic* menunjukkan sinyal negatif terhadap kesenjangan antara keinginan elit politik dan masyarakat Eropa. Namun, kemunculan *euroceptic* juga dapat menjadi sinyal positif karena mampu menunjukkan peningkatan kesadaran, minat dan kemampuan kritis dari masyarakat Uni Eropa, fenomena ini juga menyadarkan para elite politik yang tidak bisa memerintah tanpa persetujuan populer. Dan bahkan beberapa akan berargumen dengan mengatakan bahwa fenomena *euroceptic* menjadi suatu yang sehat karena dengannya segala kebijakan elit politik dapat dievaluasi dan meningkatkan pengaruh masyarakat umum dalam pembuatan keputusan institusi ini (Hansen, 2008).

Fenomena *eurosceptic* berubah secara perlahan menjadi isu diskusi mainstream di awal 1990-an. Secara historis, fenomena kemunculan istilah ini telah lebih awal digunakan oleh masyarakat Inggris sebagai ungkapan kepada sekelompok masyarakat yang tidak menginginkan integrasi Inggris bersama Uni Eropa sejak tahun 1960-an (Hansen, 2008). Dan kemudian dengan berjalannya waktu paham *eurosceptic* menjadi sebuah tantangan baru bagi para perancang Eropa masa depan, dalam beberapa waktu terakhir tidak jarang media cetak yang memfokuskan pembahasan pada fenomena ini, terlebih fenomena ini telah menjadi perbincangan hangat dikalangan akademisi dan bahkan masyarakat umum di Eropa. Dengan menjunjung sebuah ide yang tidak sejalan dengan tujuan Uni Eropa, kelompok *eurosceptic* tidak hanya khawatir terkait permasalahan ekonomi, namun lebih luas hingga permasalahan kedaulatan negara member Uni Eropa.

Masyarakat *eurosceptic* pada umumnya terfokus pada wilayah Eropa Utara. Bagi United Kingdom, Swedia, dan Denmark, projek ekonomi dan pembuatan mata uang tunggal menjadi hal utama yang menjadi penyebab lahirnya sikap *euroskeptik*. Semisal di Swedia dan United Kingdom, hanya tiga dari sepuluh dari masyarakat yang setuju bahwa menjadi anggota dari Uni Eropa akan membawa keuntungan. Bahkan beberapa negara anggota Uni Eropa masih memilih untuk menggunakan mata uang mereka sendiri dibanding menggunakan mata uang Euro (UK, Denmark, dan Swedia). Masyarakat *eurosceptic* biasanya memfokuskan diri pada kerugian menjadi anggota dari Uni Eropa ketimbang pada keuntungan yang mereka dapatkan. Beberapa argumen yang menentang perekonomian dan mata uang tunggal Euro muncul atas dasar komplain pada ketidak stabilan dan miskinnya

pengaplikasian dari mata uang tunggal ini jika dibandingkan dengan negara tetangga yang bukan merupakan anggota dari Uni Eropa. Sementara itu *euro sceptic* juga melihat bahwa Uni Eropa merupakan sebuah superbirokrasi yang tidak demokrasi bahkan mengarah pada kediktatoran.

Semenjak ratifikasi perjanjian Maastricht, yaitu ketika Uni Eropa tidak hanya mengkomodifikasi permasalahan ekonomi namun lebih jauh hingga politik, Uni Eropa mulai menghadapi banyak permasalahan-permasalahan besar. Kemudian Uni Eropa menunjukkan penurunan legitimasi berdasarkan jajak pendapat yang diselenggarakan menunjukkan penurunan dukungan masyarakat terhadap Uni Eropa. Permasalahan ini menunjukkan adanya gap antara para elit politik dan masyarakat Eropa. selanjutnya situasi ini memberikan kesempatan untuk bangkitnya konsep *euro sceptic* dalam masyarakat Uni Eropa. Fenomena ini menjadi permasalahan besar bagi Uni Eropa, terkhusus ketika Belanda dan Perancis menolak akan proyek Uni Eropa atau ketika perjanjian Lisbon diratifikasi.

Semakin besar dan ambisius tindakan Uni Eropa, maka semakin kelompok oposisi dan *euro sceptic* menjadi lebih hati-hati dan khawatir pada segala agenda yang diselenggarakan oleh Uni Eropa, dan selanjutnya menjadi kekhawatiran bagi para kelompok elit. Uni Eropa menjadi lebih tertantang oleh segala proyek politik yang terlalu kompleks, dan kemudian masyarakat menjauh dari proses integrasi. Referendum di Perancis, Denmark dan Irlandia terkait perjanjian maastricht tidak hanya menunjukkan hasil konsensus yang pesimis, namun lebih jauh dari itu bahwa

hal ini menunjukkan bahwa para elit politik eropa tidak mampu lagi untuk mengandalkan dukungan dari penduduk mengenai proyek integrasi.

Alasan atas muncul dan berkembangnya masyarakat *euroseptic* menjadi berbeda antara negara anggota baru dan negara anggota lama Uni Eropa. Banyak perbincangan pada masyarakat di bagian pusat dan barat Eropa, terkait merebaknya kekecewaan pada Uni Eropa oleh karena pembangunan ekonomi yang berdampak pada konfrontasi politik. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Uni Eropa tidak akan menjadi fokus perhatian jika tiadanya fakta bahwa fenomena Euroscepticism telah menyebar dengan cepat dalam penduduk negara-negara Uni Eropa hingga melebihi setengah dari total penduduk Uni Eropa. Maka, sementara elit politik menemukan kebijakan terkait penyelesaian krisis ekonomi, masyarakat umum mulai untuk mempertanyakan legitimasi Uni Eropa dan merasa mereka telah dipaksa untuk menerima hal-hal yang mereka tidak inginkan (Băcescu, *Euroscepticism Across Europe: Drivers and Challenges*, 2014).

Meskipun *euroseptic* memiliki sejarah yang panjang dalam awal kemunculannya, namun banyak peneliti percaya bahwa isu *euroseptic* menjadi penting dalam lingkup politik Inggris sejak masa pemilihan umum Inggris tahun 2001, yaitu ketika kelompok konservatif mengalami kekalahan selama dua periode berturut-turut. Selain itu isu *euroseptic* juga menjadi isu yang penting untuk diteliti disaat Duncan Smith berhasil memenangkan pemilu dalam memperebutkan jabatan sebagai pemimpin partai konservatif dimasa itu. Duncan Smith merupakan

pemimpin pertama partai konservatif yang mendapatkan jabatannya dengan mengikat isu *eurosceptic* sebagai taktik dalam pemilu partai.

Euroscepticism menjadi isu yang lebih relevan dalam politik Inggris setelah pemilu Eropa pada tahun 2004, di mana UKIP menerima 16% suara dan memperoleh 12 kursi dalam Parlemen Eropa (hasil partai terbukti bahkan lebih spektakuler dalam pemilu Eropa 2009, disaat partai UKIP berhasil mengalahkan Partai Buruh incumbent). Hasil ini membuktikan *euroscepticism* menjadi alat yang kuat dan penting bagi para pemenang dalam pesta demokrasi di Eropa terkhusus Inggris, yang dengannya membuat pendirian David Cameron lebih kuat dengan pbenarannya terhadap isu ini. Ketika Perjanjian Lisbon mulai diberlakukan, Cameron menunjukkan kekecewaannya dan menyatakan bahwa perjanjian telah diratifikasi tanpa masyarakat Inggris yang memiliki suara dalam referendum yang dijanjikan kepada mereka. kemudian Cameron menawarkan solusi untuk menangani situasi kedepan, dan berjanji akan mengemukakan tiga poin spesifik untuk menjamin hubungan UK-Uni Eropa.

Pertama, sepenuhnya keluar dari pengaruh *Charter of Fundamental Rights* (CFR). Tony Blair mengatakan bahwa Inggris sudah sepenuhnya terlepas dari CFR, namun menurut David Cameron tidak demikian dengan kenyataan yang berlaku. Maka, David Cameron mengusulkan untuk sepenuhnya kelular dari CFR, sehingga nantinya tidak akan mengganggu legislasi pekerja Inggris. Kedua, perlindungan yang lebih besar dari perluasan intervensi Uni Eropa terhadap Sistem Peradilan Pidana Inggris. Cameron mengusulkan perlindungan yang lebih luas dengan

penyediaan protokol tambahan. Ini akan melindungi Sistem Peradilan Pidana Inggris dari perluasan kontrol hakim Uni Eropa di Inggris, dan Cameron juga menyatakan akan memastikan bahwa hanya pemerintah Inggris yang dapat memulai investigasi kriminal di Inggris. Ketiga, restorasi kontrol nasional atas undang-undang sosial dan ketenagakerjaan. Cameron menyatakan ingin mengembalikan kontrol nasional atas bagian-bagian dari undang-undang sosial dan pekerjaan yang telah terbukti merusak perekonomian Inggris.

Cameron melanjutkan dengan menyatakan bahwa masyarakat Inggris menginginkan pembicaraan yang langsung dan jelas "*straight talk and plain speaking*" dari politisi mereka pada isu Eropa. "*People are fed up with the endless lies and spin, they just want to know what we can achieve and how*" katanya. "*What I am promising today is doable, credible and deliverable. That's what this is all about. Giving the British people a policy on Europe that they can actually believe in*".

Pernyataan dari David Cameron diatas menegaskan bahwa dirinya dan Partai Konservatif menggunakan isu euroscepticism sebagai alat untuk menunjukkan diferensiasi kebijakan partai dari Partai Buruh. Berkaca pada pemilu 2004 hingga 2009 Inggris, dapat disimpulkan bahwa Inggris diterima atau mendukung konsep *euroscepticism* (perilaku anti-Uni Eropa). Oleh karenanya, David Cameron terus menggunakan *euroscepticism* sebagai strategi diferensiasi dalam politik Inggris, terutama karena Konservatif selama masa itu sedang

mengalami kesulitan dalam menemukan taktik yang lebih baik untuk memenangkan perpolitikan di Inggris (Yongmin, 2013).

Rangkaian penjelasan dalam sub bab ini menunjukkan bahwa paham eurosceptic terus berkembang dari tahun ke tahun, baik di Inggris maupun dalam keseluruhan benua Eropa. Perkembangan eurosceptic bergerak beriringan dengan kebijakan yang datang dari Uni Eropa, dengan segala modifikasi kebijakan di dalamnya. Namun sinyal kemunculan kembali *eurosceptic* terpaut pada masa pergeseran atau lebih kepada perluasan fokus Uni Eropa, dari yang hanya dibidang ekonomi menuju bidang politik, yang ditandai dengan lahirnya perjajjian Matrik pada tahun 1992. Selanjutnya *eurosceptic* mulai berkembang lebih deras disaat para politikus menjadikan paham *eurosceptic* sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.

C. Referendum Inggris Tahun 2016

1. Latar Belakang

Referendum adalah sebuah pemilihan langsung yang mana seluruh pemilih diminta untuk menjawab pertanyaan tertentu yang diajukan. Semisal pada 18 September 2014, masyarakat Skotlandia diharuskan untuk memilih dalam referendum terkait apakah skotlandia akan menjadi negara yang independen atau tetap menjadi bagian dari United Kingdom (the Electoral Commission, 2016).

23 Januari 2013, David Cameron menjadi orang pertama yang mengajukan untuk mengadakan referendum terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa apabila partai Konservatif memenagkan pemilu pada tahun

2015, maka ia (David Cameron) akan mengadakan referendum nasional terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa, dalam penentuan Inggris menetap atau akan keluar dari Uni Eropa.

Tak lama setelah pemilu berakhir, selanjutnya pada tahun 2015 David Cameron mengumumkan bahwa dia akan melakukan renegosiasi terkait keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa dan menyatakan akan menyelenggarakan referendum nasional terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Hasil dari pemilihan akan berdampak sangat signifikan terhadap hubungan Inggris dengan seluruh negara-negara Eropa pada dekade mendatang. David Cameron juga menyatakan bahwa ini akan menjadi keputusan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Inggris (Burns, 2016).

Pemerintah baru Konservatif memperkenalkan rancangan undang-undang referendum Uni Eropa 2015-2016, yang disediakan untuk referendum yang akan digelar sebelum akhir 2017. Undang-undang referendum Uni Eropa tahun 2015, dijalankan berdasarkan persetujuan Royal pada tanggal 17 Desember 2015, dibuat untuk penyelenggaraan referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Pertanyaan referendum adalah: "Haruskah Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa?" (the Electoral Commission, 2016).

Warga yang memiliki hak memilih dalam referendum telah dijelaskan dalam UU Referendum 2015. Hak pilih dalam referendum ini, didasarkan sebagaimana hak pilih yang digunakan dalam pemilihan Parlemen Inggris, dengan tambahan seluruh negara persemakmuran Inggris dan penduduk yang bertempat

tinggal di daerah Gibraltar. Pemungutan suara akan diadakan di 'daerah penghitungan', yaitu daerah terdaftar yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai tempat pendaftaran referendum. Terdapat 382 daerah penghitungan di United Kingdom, 380 daerah bertempat di England, satu di Irlandia Utara dan satu di Gibraltar (Uberoi, 2016).

2. Pergulatan Logika Antara Brexit dan Bremain

Dalam penyelenggaraan referendum Inggris 2016 terkhusus dimasa kampanye, banyak pergulatan logika yang berkembang dalam masyarakat Inggris. Banyak perdebatan yang muncul di tangan masyarakat Inggris di masa itu, dari akademisi hingga masyarakat pada umumnya. Permasalahan yang berkembang melingkupi topik ekonomi, politik, hukum hingga pertahanan negara. Dalam bagian dari sub-bab ini penulis akan menjabarkan beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan antara kelompok brexit dan bremain, beserta argumen dari masing-masing pihak.

Imigrasi, menjadi topik utama yang menjadi perdebatan antara kedua kubu dalam kampanye, selain itu bahwa permasalahan ini menjadi isu utama yang dibawa oleh brexit. Dalam kaca mata brexit mengemukakan bahwa Inggris tidak akan pernah bisa mengontrol peredaran imigran di Inggris kecuali setelah mampu meninggalkan keanggotaan Uni Eropa, semua ini karena kebijakan Uni Eropa yang membebaskan peredaran masyarakat di seluruh negara Uni Eropa hingga kebebasan hak untuk tinggal di seluruh negara member Uni Eropa. Sedangkan dalam kaca mata bremain, melepas keanggotaan dari Uni Eropa tidak akan mampu

menyelesaikan permasalahan imigrasi, karena pintu masuk benua akan bergeser dari Calais di Prancis ke Dover di Inggris.

Isu perdagangan menjadi perdebatan populer dalam kampanye, oleh karena awal tujuan pendirian EEC untuk mewujudkan perdagangan bebas diantara anggotanya, isu ini kemudian terlihat menjadi sebuah isu yang penting. Bagi brexit, hubungan dagang Inggris dengan negara-negara di Uni Eropa membatasi Inggris untuk memperluas hubungan perdagangan mereka dengan negara-negara berkembang lainnya seperti China dan India. Meninggalkan Uni Eropa akan mempermudah Inggris dalam memperluas daerah perdagangannya. Berbeda dengan kelompok brexit, mereka datang dengan mengangkat fakta bahwa 44 persen dari ekspor Inggris ditujukan untuk negara-negara anggota uni Eropa lainnya. Memberikan hambatan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya terkait perdagangan Inggris akan membuat keadaan yang kontraproduktif.

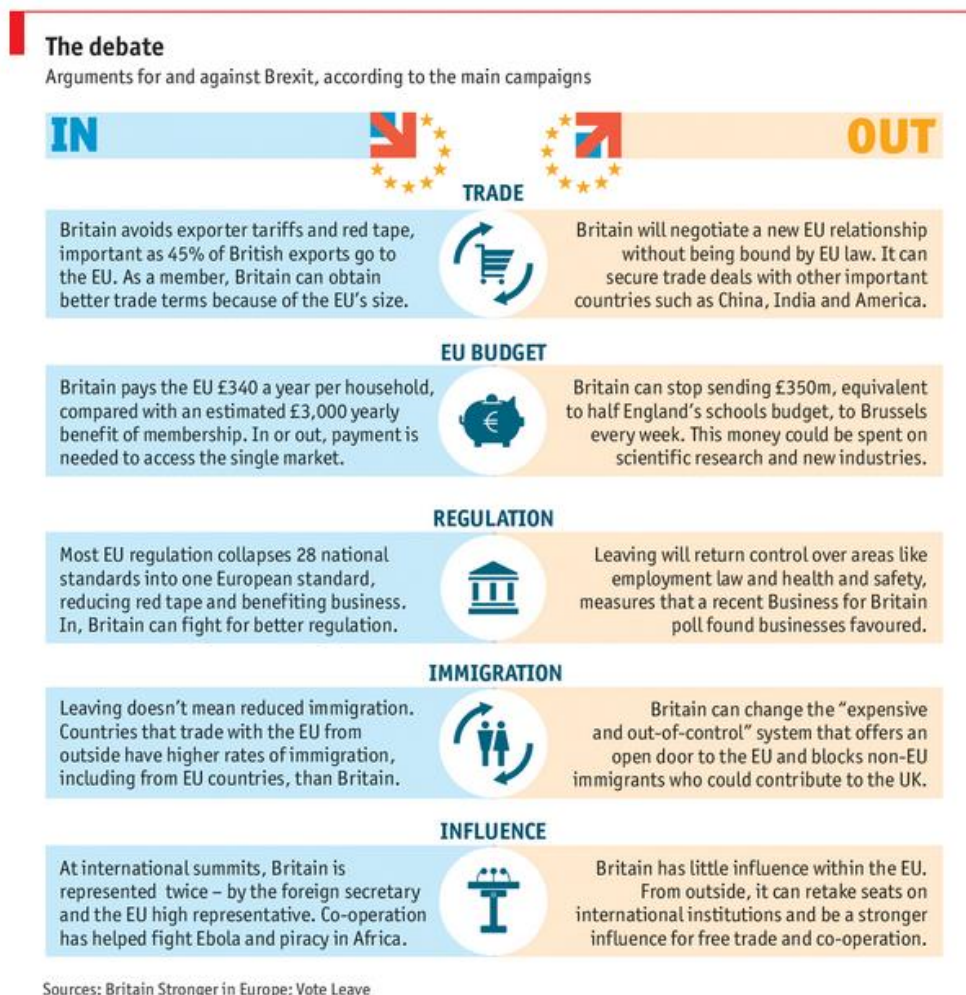
Dalam segi isu Hukum, menurut pandangan brexit bahwa terlalu banyak hukum Inggris merupakan produksi dari luar negeri, dan mengacu berdasarkan kendali dari Brussels, ditambah dengan selanjutnya hukum tersebut di jalankan oleh European Court of Justice. Pengadilan Inggris akan mendapatkan kedaulatannya kembali apabila Inggris berhasil melepaskan diri dari Uni Eropa. Sedangkan dalam pandangan brexit, kampanye brexit sangatlah berlebihan terkait hukum yang dibuat oleh European Commission. Akan menjadi keputusan yang lebih baik apabila Inggris mendapatkan andil dalam pembuatan hukum Uni Eropa yang luas dari dalam ketimbang memutuskan keluar dari Uni Eropa.

Isu kedaulatan termasuk isu andalan brexit dalam perjalanan kampanye referendum. Dalam keyakinan brexit, parlemen Inggris telah kehilangan kedaulatan. Dengan keinginan kuat Uni Eropa untuk memperluas area kerjasama dan lebih jauh bahkan terjadinya krisis di Eropa, akan menjadi keputusan yang bijak untuk meninggalkan Uni Eropa sebelum permasalahan yang terjadi semakin meluas. Sementara bremain mengemukakan bahwa dalam dunia globalisasi, setiap negara berkeharusan untuk melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keinginan masyarakat England untuk mengisolasi diri akan berdampak pada kehancuran United Kingdom keseluruhan.

Selanjutnya dalam isu pertahanan, brexit melihat fakta yang terjadi bahwa Inggris diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam pembuatan militer Uni Eropa, dengan laporan menunjukkan Angela Merkel mungkin menuntut persetujuan Perdana Menteri imbalan konsesi lainnya. Bagi brexit peristiwa ini hanya akan mengikis keindependenan kekuatan militer di Inggris dan harus ditentang. Sedangkan tanggapan bremain dalam melihat isu ini ialah bahwa negara-negara Eropa harus saling bekerja sama dalam menghadapi ancaman yang datang dari ISIS dan kekuatan Rusia yang bangkit kembali. Bekerjasama dalam menghadapi tantangan ini akan menjadi pilihan yang lebih terbaik, dan upaya ini akan rusak apabila Inggris melepas keanggotaan dari Uni Eropa (Riley-Smith, 2016).

Rangkaian penjelasan diatas merupakan sekumpulan kecil dari argumen yang dimiliki oleh tiap-tiap kubu baik brexit maupun bremain. Dan dalam perhelatan agenda referendum Inggris ini, kedua kelompok kampanye yang ada

telah membentuk kelompok lobi resmi yaitu “Britain Stronger In Europe” (bremain) dan “Vote Leave” (brexit), pembuatan kelompok resmi ini ditujukan untuk memperkuat posisi mereka terhadap topik-topik tertentu yang mendasar dalam pelaksanaan referendum (The Economist, 2016). Berikut pergulatan argumen antara brexit dan bremain yang telah dirangkum oleh ‘The Economist’ dalam laman situs nya :



Gambar 1 - Argumen setiap kubu dari Brexit dan Bremain dalam kampanye

(Sumber : The Economist)

3. Hasil Penghitungan Suara Referendum

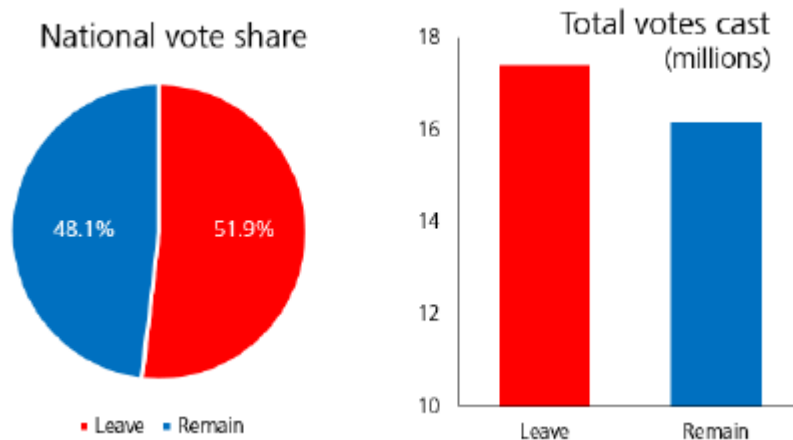
Jumlah total pemilih dalam referendum berjumlah 33.577.342, dengan persentase 72,2% dari total penduduk Inggris. Referendum dimenangkan oleh Brexit dengan margin sebesar 3,8 persen.

National result		
	Votes cast	% of valid votes
Leave	17,410,742	51.9%
Remain	16,141,241	48.1%
Winning margin for 'Leave'	1,269,501	3.8%
Total valid votes	33,551,983	
Rejected papers	25,359	
Total votes cast	33,577,342	

Gambar 2 - Hasil total pemilih dalam referendum Inggris Raya 2016

(Sumber : House of Commons Library)

Angka dan diagram di bawah ini menunjukkan jumlah total suara, dan porsi suara nasional untuk jumlah suara Brexit dan Bremain.



Gambar 3 - Jumlah suara referendum untuk Brexit dan Bremain

(Sumber : House of Commons Library)

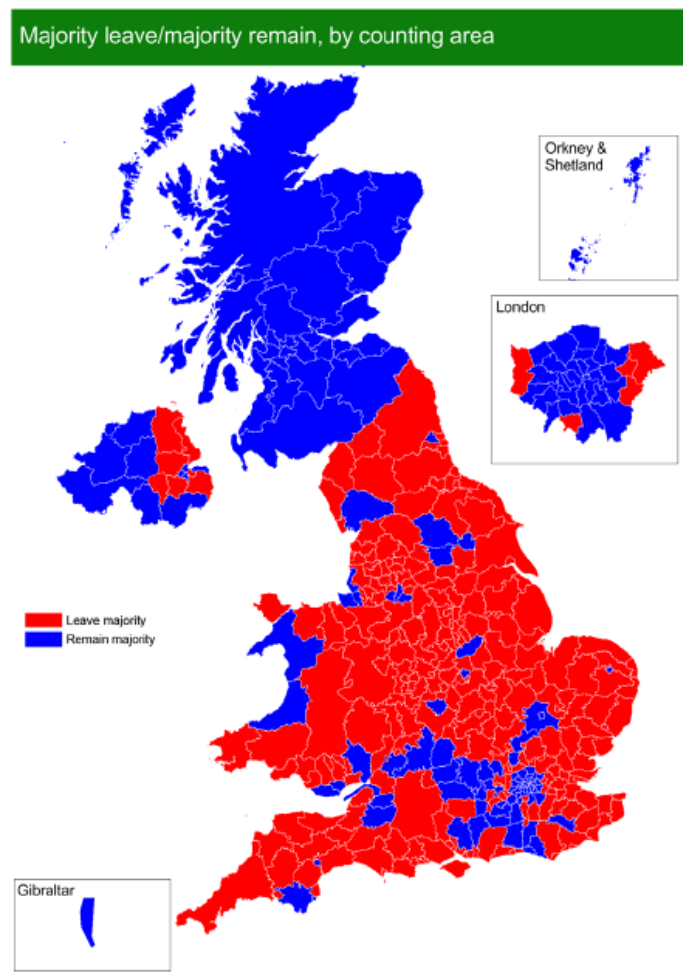
Suara dari pemilih Brexit dan Bremain tidak tersebar merata diseluruh United Kingdom. Brexit memenangkan suara tertinggi di wilayah England dan Wales, sedangkan Bremain memenangkan suara tertinggi di wilayah Scotlandia dan Irlandia Utara. Di England, Bremain hanya berhasil menang secara mayoritas di wilayah London.

Proportion of the vote across the UK		
	Leave (%)	Remain (%)
England	53.4%	46.6%
Wales	52.5%	47.5%
Scotland	38.0%	62.0%
Northern Ireland	44.2%	55.8%

Gambar 4 - Hasil penghitungan suara berdasarkan negara bagian Inggris Raya

(Sumber : House of Commons Library)

Suara tertinggi yang berhasil dicapai oleh Brexit di daerah bagian ialah sebesar 76%, yaitu di wilayah Boston (Lincolnshire). Sementara suara tertinggi yang berhasil dicapai oleh Bremain ialah sebesar 96%, yaitu di daerah Gibratar (Uberoi, 2016).



Gambar 5 - Pemetaan jumlah pemilih Brexit dan Bremain

(Sumber : House of Commons Library)